

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Potensi bencana alam yang tinggi yang dimiliki wilayah-wilayah di Indonesia pada dasarnya merupakan refleksi dari kondisi geografis yang sangat khas untuk wilayah tanah air kita. Indonesia merupakan negara kepulauan tempat bertemunya tiga lempeng besar dunia bertemu, yaitu Lempeng Indo-Australia, Lempeng Eurasia dan Lempeng Pasifik. Interaksi antar lempeng-lempeng tersebut lebih lanjut menempatkan Indonesia sebagai wilayah yang memiliki aktivitas kegunungapian dan kegempabumian yang cukup tinggi. Lebih dari itu, proses dinamika lempeng yang cukup intensif juga telah membentuk relief permukaan bumi yang khas dan sangat bervariasi, dari wilayah pegunungan dengan lereng-lerengnya yang curam dan seakan menyiratkan potensi longsor yang tinggi hingga wilayah yang landai sepanjang pantai dengan potensi ancaman banjir, penurunan tanah, dan tsunaminya. Permasalahannya adalah sudahkah kita mengenal dengan baik berbagai jenis dan karakter bahaya alam tersebut dan siapkah kita dalam mengantisipasinya.

Potensi bahaya alam ini telah diperparah oleh beberapa permasalahan lain yang muncul di tanah air kita yang memicu kerentanan. Laju pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi, sebagai salah satu contohnya, akan banyak membutuhkan kawasan-kawasan hunian baru yang pada akhirnya kawasan hunian

tersebut akan terus berkembang dan menyebar hingga mencapai wilayah-wilayah marginal yang tidak aman.

Tidak tertibnya tata guna lahan, sebagai inti dari permasalahan ini, adalah faktor utama yang menyebabkan adanya peningkatan kerentanan. Peningkatan kerentanan ini akan diperparah bila aparat pemerintah maupun masyarakatnya sama sekali tidak menyadari dan tanggap terhadap adanya potensi bahaya di daerahnya. Pengalaman memperlihatkan bahwa kejadian-kejadian bencana selama ini telah banyak menimbulkan kerugian dan penderitaan yang cukup berat sebagai akibat dari perpaduan bahaya alam dan kompleksitas permasalahan lainnya. Untuk itu diperlukan upaya-upaya yang komprehensif untuk mengurangi resiko bencana alam, antara lain dengan melakukan kegiatan mitigasi.

Dalam mitigasi diperlukan berbagai data dan gambaran yang berkenaan dengan keadaan wilayah serta ruang suatu daerah, oleh karena itu dibutuhkan sebuah sistem yang terintegrasi dengan kemampuan dapat menggabungkan data tersebut dan kemudian menganalisisnya menjadi sebuah acuan untuk melakukan tindakan mitigasi. Gempabumi salah satunya, merupakan aktivitas yang berpotensi menjadi bencana yang mana bila kurang dalam memahaminya maka akan banyak menimbulkan kerusakan.

Permasalahan ruang yang semakin kompleks mendorong kebutuhan akan pemahaman lingkungan yang semakin tinggi pula, akan tetapi masih belum jelas tingkat kesadaran masyarakat untuk memahami hal itu. Untuk mencapai kesadaran lingkungan, terutama dalam menghadapi gempabumi ada beberapa tahap atau proses yang masyarakat harus lalui, yaitu sebelum sadar masyarakat

harus paham terlebih dahulu sedangkan pemahaman memerlukan pengetahuan-pengetahuan dari berbagai sumber.

Secara geografis Indonesia terletak di daerah katulistiwa dengan morfologi yang beragam dari daratan sampai pegunungan tinggi. Keragaman morfologi ini banyak dipengaruhi oleh faktor geologi, terutama dengan adanya aktivitas pergerakan lempeng tektonik aktif di sekitar perairan Indonesia diantaranya adalah lempeng Eurasia, Indonesia-Australia dan lempeng Dasar Samudera Pasifik. Pergerakan lempeng-lempeng tektonik tersebut menyebabkan terbentuknya jalur gempa bumi, rangkaian gunung api aktif serta patahan-patahan yang dapat berpotensi menjadi sumber gempa bumi

Sejumlah peristiwa bencana gempa bumi dengan magnitudo besar akhir-akhir ini sering terjadi di beberapa wilayah Indonesia, seperti gempa bumi dan tsunami di Aceh pada tanggal 26 Desember 2004, gempa bumi di Pulau Nias pada tanggal 28 Maret 2005, di Yogyakarta pada tanggal 27 Mei 2006, di Pangandaran 17 Juli 2006, di Tasikmalaya 2 September 2009 dan gempa bumi Padang 30 September 2009.

Jawa Barat termasuk salah satu wilayah yang memiliki kerawanan bencana tinggi, kondisi ini dipengaruhi oleh tatanan geologi yang kompleks sehingga rawan dengan bencana geologi gempa bumi Berdasarkan catatan sejarah gempa bumi merusak di Indonesia yang disusun oleh Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (DVMBG) di wilayah Jawa Barat pernah terjadi sedikitnya 29 kali bencana gempa bumi dengan kategori merusak terutama yang bersumber di darat sejak tercatat tahun 1883 sampai sekarang. Sebagian dari

daerah–daerah yang rawan mengalami bencana geologi gempabumi berada pada wilayah padat penduduk seperti Bogor, Cianjur, Pelabuhanratu-Sukabumi, Rajamandala-Padalarang, Ciamis-Kuningan Sumedang-Majalengka, Tasikmlaya, Bandung dan hampir seluruh wilayah pegunungan Jawa Barat Selatan.

Karakteristik gempabumi di Jawa Barat sebagian besar bukan dari zona subduksi/zona penunjaman, akan tetapi dari patahan/sesar aktif di darat. Gempabumi yang bersumber dari sesar aktif di darat sangat berpotensi merusak meskipun magnitudonya tidak terlalu besar, namun kedalamannya dangkal dan dekat dengan pemukiman dan aktivitas manusia. Gempabumi sampai sekarang belum dapat diperkirakan saat kejadiannya, lokasi dan kekuatannya. Gempabumi dapat terjadi siang hari pada saat kita bekerja ataupun malam pada saat sedang tidur lelap, sehingga kecil kemungkinan dapat menyelamatkan diri karena kejadiannya berlangsung sangat cepat. Sehingga tidak menutup kemungkinan tertimpa runtuh bangunan, longsor bukit ataupun tersapu badai tsunami.

Upaya untuk mengurangi dampak bencana yaitu dengan melakukan kegiatan yang disebut Mitigasi Bencana sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana untuk menghadapi kemungkinan bencana yang akan datang. Salah satu bentuk mitigasi untuk meminimalisasi dampak korban gempabumi yaitu dengan mengetahui karakteristik setiap wilayah untuk mengetahui tingkat kerawanannya terhadap bencana, sebagai pedoman penataan ruang kawasan rawan bencana gempabumi sebagaimana yang tercantum dalam UU No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.

Bulan September tahun 2009, tepatnya hari rabu tanggal dua terjadi sebuah gempa bumi, gempa bumi yang tercatat terjadi sekitar pukul 14.55 WIB ini ternyata berpusat di 142 km barat daya Tasikmalaya, Jawa Barat. Episentrum Gempabumi ini terdapat pada kedalaman 30 Km dari permukaan laut dan berpotensi tsunami. Magnitudo 7,3 SR tercatat oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), getaran tidak hanya terasa di Tasikmalaya saja, Bandung bahkan Jakarta pun ikut berguncang. Sehingga korban pun tidak hanya jatuh dari wilayah Tasikmalaya saja, Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung merupakan salah satu daerah yang mengalami kerusakan.

Berawal dari uraian tersebut diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berkenaan dengan tingkat pengetahuan masyarakat Pangalengan dalam menghadapi gempa bumi. Penulis memberi judul pada penelitian ini yaitu “Kesiapsiagaan Masyarakat dalam menghadapi Bencana Gempabumi Di Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung”.

1.2 Rumusan Masalah

Masalah adalah kesenjangan antara keinginan yang diharapkan dengan kenyataan yang terjadi. Gempabumi Tasikmalaya yang baru-baru ini terjadi seperti menjadi sebuah jam *waker* yang membangunkan kesadaran warga Jawa Barat, Tasikmalaya dan khususnya Pangalengan. Sadar bahwasannya mereka tinggal pada daerah yang rawan gempa bumi, namun kesadaran tersebut seperti bangun yang terpaksa, korban-korban yang timbul baik jiwa maupun harta kebanyakan berawal dari kurang-siagaan masyarakat dalam menghadapi

bencana alam tersebut. Bukankah kita berada pada negeri yang rawan gempa bumi; Aceh, Yogyakarta, Padang, Nias merupakan beberapa contoh saja sehingga pantas kalau di sebut bahwa kita “akrab” dengan gempa bumi. Dalam keakraban tersebut masyarakat seharusnya paham akan bahayanya, serta bagaimana mengantisipasinya.

Namun berkaca pada gempa bumi yang terjadi September 2009 lalu di Pangalengan, nampak jelas bahwa masyarakat “akrab” dengan gempa bumi. Namun keakraban tersebut baru sampai tahap dekat (terjadi di sekitar mereka) sehingga banyak korban meninggal dan banyak rumah hancur sehingga memaksa ribuan penduduk mengungsi dari rumahnya.

Dengan demikian nampak disini bahwa ada kecenderungan masyarakat Pangalengan belum siap menghadapi gempa bumi. Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan diatas, berikut beberapa pertanyaan penelitian yang dapat dirumuskan:

1. Bagaimana tingkat kerusakan yang ditimbulkan gempa bumi pada September 2009 di Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung?
2. Bagaimana tingkat kesiapsiagaan masyarakat di Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung berkenaan dengan bencana gempa bumi?

1.3 Tujuan Penelitian

Melihat permasalahan yang muncul diatas maka ada beberapa hal yang menjadi tujuan dalam penelitian ini. Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah:

1. Mengidentifikasi besarnya tingkat kerusakan yang ditimbulkan gempa bumi September 2009 di Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung.
2. Mengidentifikasi tingkat kesiapsiagaan masyarakat di Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung berkenaan dengan bencana gempa bumi.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin diperoleh dari pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diperolehnya data atau informasi mengenai tingkat kerusakan di Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung akibat gempa bumi September 2009.
2. Diperolehnya gambaran tentang tingkat kesiapsiagaan masyarakat di Kecamatan Pangalengan dalam menghadapi bencana gempa bumi.

1.5 Definisi Operasional

Judul penelitian ini adalah “Kesiapsiagaan Masyarakat Dalam Menghadapi Gempabumi Di Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung”, berikut ini akan dijabarkan definisi operasional yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu:

1. Kesiapsiagaan menurut Carter (1991: 29) adalah “tindakan-tindakan yang memungkinkan pemerintahan, organisasi-organisasi, masyarakat, komunitas dan individu untuk mampu menanggapi suatu situasi bencana secara cepat dan tepat guna. Termasuk ke dalam tindakan kesiapsiagaan adalah penyusunan rencana penanggulangan bencana, pemeliharaan sumberdaya dan pelatihan personil.”

2. Parameter Kesiapsiagaan

Parameter adalah tolak ukur dalam menentukan tingkatan dari sebuah kondisi. Menurut tim peneliti LIPI-UNESCO/ISDR (2006:46), kesiapsiagaan memiliki beberapa parameter yang dapat diukur yaitu: “*knowledge and attitude* (KA); *emergency planning* (EP), *Warning System* (WS), dan *Resource Mobilization Capacity* (RMC). Seberapa siap suatu komunitas/masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana, tergantung dari indeks per parameter yang dimiliki oleh anggota/komponen yang ada pada komunitas/masyarakat tersebut”.

3. Tingkatan Kesiapsiagaan

Menurut LIPI-UNESCO/ISDR (2006:46-47) “Semakin tinggi angka indeks berarti semakin tinggi pula tingkatan kesiapsiagaannya dari subjek yang diteliti”. Tingkat kesiapsiagaan masyarakat dalam kajian ini dikategorikan menjadi lima, yaitu; sangat siap, siap, hampir siap, kurang siap, belum siap.

4. Masyarakat, menurut Poerwadarminta (1986) mengartikan “masyarakat sebagai pergaulan hidup manusia atau sehimpunan orang yang hidup bersama dalam sesuatu dengan ikatan-ikatan aturan yang tentu”, sedangkan menurut Koentjaraningrat (1984) masyarakat adalah “kolektif manusia dalam arti yang seluas-luasnya yang terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka pandang sama”.

5. Gempabumi, menurut Direktorat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (tanpa tahun:4) adalah “getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi. Gempabumi biasa disebabkan oleh pergerakan kerak bumi (lempeng

bumi). Bumi kita walaupun padat, selalu bergerak, dan gempa bumi terjadi apabila tekanan yang terjadi karena pergerakan itu sudah terlalu besar untuk dapat ditahan”.

6. Kecamatan Pangalengan adalah sebuah wilayah yang berada pada lingkup administratif Kabupaten Bandung.

Jadi, setelah memperhatikan penjelasan di atas, penelitian ini akan mencoba mengungkapkan kesiapan yaitu berupa tindakan-tindakan yang memungkinkan individu-individu yang terhimpun secara kolektif di wilayah administratif Kecamatan Pangalengan untuk mampu menanggapi situasi bencana gempa bumi secara cepat dan tepat guna. Kesiapsiagaan tersebut dapat dicermati dari pengetahuan dan sikap, rencana kedaruratan, serta kemampuan memobilisasi sumberdaya yang kemudian dapat mengukur tingkat kesiapsiagaannya, yang meliputi kondisi sangat siap/siap/hampir siap/kurang siap atau bahkan belum siap.